

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022

Nurul Jannah*, Ima Amalia

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*njannah15@gmail.com, amalia.razi@gmail.com

Abstract. Third Party Funds (DPK) have an important role for banks, because third party funds are a source for banks in channeling financing to third parties as well as for other asset allocations. This study aims to determine the effect of the number of offices, profit sharing, inflation, and LPE on (DPK) at Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2010-2022. The type of research used is descriptive quantitative with a verification approach. The data used is secondary data, namely annual data from 2010-2022 which consists of DPK, number of offices, and Profit Sharing of Islamic Commercial Banks as well as macro-economic variables, namely inflation and LPE. Secondary data was obtained from the official publication of the Indonesian Financial Services and Statistics Authority website from the Central Bureau of Statistics. Data processing uses the Eviews program version 9.0 with the Ordinary Least Square (OLS) method. From the results of model estimation, the independent variables that partially affect DPK are the number of offices and profit sharing because the probability value is less than 0.05 and 0.1. Meanwhile, LPE and inflation partially affect DPK in Islamic Commercial Banks in Indonesia. However, together the number of offices, profit sharing, inflation and LPE have an effect on DPK at Islamic Commercial Banks in Indonesia. The results of the study show that the number of offices, profit sharing, inflation and LPE all have an effect on Third Party Funds (DPK). The large variation in the variable number of offices, profit sharing, inflation and LPE on DPK was 77.09% while the rest was due to variations in other variables not included in the study.

Keywords: *Third Party Funds (DPK), Profit Sharing, Inflation.*

Abstrak. Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki peranan penting bagi bank, karena dana pihak ketiga merupakan sumber bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada pihak ketiga serta untuk alokasi aset lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah kantor, bagi hasil, inflasi, dan LPE terhadap (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan verifikasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data tahunan dari 2010-2022 yang terdiri atas DPK, jumlah kantor, dan Bagi Hasil Bank Umum Syariah serta variabel makroekonomi yaitu inflasi dan LPE. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi website Otoritas Jasa Keuangan dan Statistik Indonesia dari Badan Pusat Statistik. Pengolahan data menggunakan program Eviews versi 9.0 dengan metode ordinary Least Square (OLS). Dari hasil estimasi model, variabel independen yang secara parsial berpengaruh terhadap DPK adalah jumlah kantor dan bagi hasil karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 dan 0,1. Sedangkan LPE dan inflasi secara parsial berpengaruh terhadap DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Namundemikian secara bersama-sama jumlah kantor, bagi hasil, inflasi dan LPE berpengaruh terhadap DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kantor, bagi hasil, inflasi dan LPE secara bersama-sama berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Adapun besarnya variasi variabel jumlah kantor, bagi hasil, inflasi dan LPE terhadap DPK sebesar 77,09% sedangkan sisanya karena variasi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Kata Kunci: *Dana Pihak Ketiga (DPK), Bagi Hasil, Inflasi.*

A. Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur tentang segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi intermediasi dalam bank mengharuskan bank memperhatikan keberlangsungan kegiatan penyaluran dari dana yang dihimpun dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian. Penyaluran pembiayaan memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang seluruh kegiatan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang yang mendorong Pembangunan perekonomian masyarakat. Berdasarkan fungsi ini bank berperan sebagai Agent of Development.

Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat (Iska, 2012). Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank serta meningkatnya aset bank syariah secara signifikan pada tahun 2020-2022. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022

Kelompok Bank	Tahun		
	2020	2021	2022
Bank Umum Syariah (BUS)			
Jumlah Bank	14	12	13
Jumlah Kantor	2.034	2.035	2.007
Unit Usaha Syariah (UUS)			
Jumlah Bank	20	21	20
Jumlah Kantor	392	444	438
BPR Syariah			
Jumlah Bank	163	164	167
Jumlah Kantor	427	659	668

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan kelembagaan bank syariah direspon positif oleh pelaku industri perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah yang melebihi perkembangan perbankan konvensional. Jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2008 bertambah seiring dengan beroperasinya jumlah bank syariah baru. Perkembangan perbankan syariah ini terlihat dari meningkatnya jumlah kantor BUS 2.034 dan UUS sebanyak 392 kantor di tahun 2020 bertambah menjadi BUS sebanyak 2.035 dan UUS 444 kantor pada tahun 2021. Sedangkan BPR Syariah di tahun 2020 sebanyak 427 bertambah pada tahun 2021 sebanyak 659 kantor. Hal tersebut merupakan respon positif dari kalangan masyarakat yang ingin hijrah dari bank konvensional ke bank syariah sehingga semakin pesatnya penambahan jumlah kantor bank syariah yang berdampak pada peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga dan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2018 sampai tahun 2022 (Otoritas Jasa

Keuangan, 2022).

Asset pada BUS di Indonesia meningkat tiap tahunnya. Aset BUS dalam setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 8,95%. Padahal jika dilihat dari pasar BUS sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sehingga pertumbuhan asset yang sebesar 8,95% masih dianggap terlalu kecil untuk pangsa pasar Indonesia yang mayoritasnya muslim. Semakin besar Dana Pihak Ketiga maka semakin besar asset BUS.

Menurut (Septi, 2013), sumber DPK yang dihimpun oleh bank merupakan dana dari bank yang dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. DPK memiliki fungsi yang penting dalam sumber modal bank syariah, dalam kegiatan menghimpun dana tersebut, terdapat faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi DPK, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi DPK berupa bagi hasil yang diberikan oleh bank umum syariah dan jumlah kantor layanan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Faktor internal selanjutnya yang dapat mempengaruhi DPK bank umum syariah yaitu jumlah kantor. Jumlah kantor merupakan salah satu faktor pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat. Meningkatnya jumlah kantor bank syariah akan memudahkan masyarakat menempatkan dananya pada bank syariah dan juga membuka kesempatan besar bagi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pada penelitian (Nugraheni, 2017) jumlah kantor berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga BPRS di Indonesia. Faktor eksternal yang mempengaruhi DPK pada bank umum syariah yaitu LPE dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang yang biasanya pertumbuhan ekonomi dipakai untuk mengukur tingkat prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, maka pendapatan pada masyarakat akan meningkat sehingga masyarakat akan menyimpan sebagai pendapatannya untuk menabung.

Salah satu alat pengukur lain yang selalu digunakan untuk menilai keteguhan suatu ekonomi adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkatan inflasi pada periode ke periode lainnya akan berbeda dan tingkatan tersebut akan berbeda di tiap negara (Sukirno, 2001).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh jumlah kantor, bagi hasil, LPE, dan inflasi secara parsial dan secara bersama-sama terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022, serta berapa besar variasi variabel jumlah kantor, bagi hasil, LPE, dan inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh jumlah kantor, bagi hasil, LPE, dan inflasi secara parsial dan secara bersama-sama terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2010-2022.
2. Untuk mengidentifikasi variasi variabel jumlah kantor, bagi hasil, LPE, dan inflasi secara parsial dan secara bersama-sama terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2010-2022.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu statistik Bank Syariah Indonesia dari tahun 2010-2022. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan verifikatif menggunakan analisis regresi. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda, yang merupakan metode statistik untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dan satu variabel terikat dengan metode Ordinary Least Square (OLS) atau metode kuadrat kecil bias penyimpangan hasil perhitungan regresi terhadap kondisi actual. OLS merupakan metode estimasi fungsi regresi yang paling sering digunakan. Kriteria OLS adalah "Line of Best Fit" atau dengan kata lain jumlah kuadrat dari deviasi antara titik-titik observasi dengan garis regresi adalah minimum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah penelitian mengenai pengaruh jumlah kantor, bagi hasil, inflasi, dan LPE yang mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2022. Adapun hasil estimasi model dengan menggunakan program Eviews 9.0 terdapat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Awal

Dependent Variable: LOG(DPK)
Method: Least Squares
Date: 08/14/23 Time: 15:04
Sample: 1 13
Included observations: 13

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.74790	6.012784	-1.787508	0.1117
LOG(JML_KANTOR)	2.473364	0.739496	3.344660	0.0102
BAGI_HASIL	-0.392515	0.197510	-1.987319	0.0821
LPE	-0.056812	0.123307	-0.460739	0.6573
INFLASI	0.003682	0.086200	0.042713	0.9670
R-squared	0.847322	Mean dependent var		5.515117
Adjusted R-squared	0.770982	S.D. dependent var		0.675140
S.E. of regression	0.323093	Akaike info criterion		0.861972
Sum squared resid	0.835114	Schwarz criterion		1.079260
Log likelihood	-0.602818	Hannan-Quinn criter.		0.817309
F-statistic	11.09943	Durbin-Watson stat		1.881248
Prob(F-statistic)	0.002385			

Sumber: perhitungan Eviews

Persamaan regresi yang terbentuk:

$$DPK = -10,74790 + 2,463364JK - 0,392515MH - 0,056812 LPE + 0,003682 P$$

Uji Asumsi Klasik

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastis dengan menggunakan uji white menampilkan bahwa nilai probabilitas chi square lebih besar dari $\alpha = 5$ persen ($0,4242 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 diterima yang berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model estimasi.

4. Uji Linieritas

Dalam penelitian ini, uji linieritas menggunakan uji Ramsey Reset Test. Hasil uji linieritas dengan menggunakan Ramsey Reset Test menampilkan bahwa nilai probabilitas F hitung sebesar $0,1056 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antar variabel independent.

5. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan model estimasi tersebut diperoleh nilai R-squared (R^2) LS DPK C JML KANTOR BAGI HASIL LPE INFLASI = 0,847 lebih besar dibandingkan dengan nilai R^2 LS JML KANTOR C BAGI HASIL LPE INFLASI = 0,410, R^2 LS BAGI HASIL C JML KANTOR LPE INFLASI = 0,727, R^2 LS LPE C BAGI HASIL JML KANTOR INFLASI = 0,565, R^2 LS INFLASI C BAGI HASIL JML KANTOR LPE = 0,769. Dengan mengikuti rule of thumb dari metode ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen oleh model estimasi. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model estimasi.

6. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai probabilitas chi square sebesar 0,3590. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala autokorelasi.

7. Uji Normalitas

Hasil uji Normalitas dengan menggunakan Jarque Bera menampilkan bahwa nilai probabilitas $Obs * R^2$ lebih besar dari $\alpha = 5$ persen ($0,128906 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 diterima yang berarti data dari variabel dependen dan independen berdistribusi normal.

Uji Statistik

1. Uji T-Statistik

Tabel 3. Uji T-Statistik Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.74790	6.012784	-1.787508	0.1117
LOG(JML_KANTO R)	2.473364	0.739496	3.344660	0.0102
BAGI_HASIL	-0.392515	0.197510	-1.987319	0.0821
LPE	-0.056812	0.123307	-0.460739	0.6573
INFLASI	0.003682	0.086200	0.042713	0.9670
R-squared	0.847322	Mean dependent var		5.515117
Adjusted R-squared	0.770982	S.D. dependent var		0.675140
S.E. of regression	0.323093	Akaike info criterion		0.861972
Sum squared resid	0.835114	Schwarz criterion		1.079260
Log likelihood	-0.602818	Hannan-Quinn criter.		0.817309
F-statistic	11.09943	Durbin-Watson stat		1.881248
Prob(F-statistic)	0.002385			

Sumber: perhitungan Eviews

Jumlah kantor memiliki nilai koefisien positif dengan nilai probabilitas sebesar 2,4733 > 0,05, maka jumlah kantor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Bagi hasil memiliki nilai koefisien negative dengan nilai probabilitas sebesar 0,3932 > 0,05, maka bagi hasil tidak berpengaruh Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia. LPE memiliki nilai koefisien negative dengan nilai probabilitas sebesar 0,6573 > 0,05, maka LPE tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Inflasi memiliki nilai koefisien positif dengan nilai probabilitas sebesar 0,9670 > 0,05, maka inflasi tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Uji F-Statistik

Berdasarkan Uji F, didapatkan nilai probabilitas F-stat sebesar 11,09943 > 0,05. Sehingga F-stat > F-Tabel. Hal ini berarti variabel independen (jumlah kantor, bagi hasil, LPE, dan inflas) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Pengaruh Jumlah Kantor Terhadap DPK Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022

Dari hasil estimasi model dan pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa jumlah kantor berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum syariah dimana memiliki koefisien regresi hasilnya positif. Artinya peningkatan jumlah kantor akan mempengaruhi perkembangan DPK. Adapun besarnya nilai koefisien jumlah kantor adalah sebesar 2.473364 artinya, jika jumlah kantor meningkat sebesar 1% maka Dana Pihak Ketiga akan meningkat sebesar 2.473364% atau sebaliknya dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh jumlah kantor terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Secara teori semakin banyaknya jumlah kantor bank maka kesempatan masyarakat untuk menabung semakin banyak dan meningkat. Dengan kondisi yang seperti ini maka akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya di bidang perbankan (Latumerrisa, 2011). Selain itu BUS dianggap masih kurang dalam memberikan sosialisasi tentang keberadaan dan pemahaman tentang BUS ke plosok-plosok daerah.

Pengaruh Bagi Hasil Terhadap DPK Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022

Dari hasil estimasi model dan pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa bagi hasil memiliki nilai koefisien negatif signifikan terhadap DPK dengan nilai probabilitas -0,3925 > 0,05% sehingga pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0.05$) bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap DPK. Bagi hasil memiliki arah koefisien yang positif artinya semakin tinggi bagi hasil maka

DPK akan semakin tinggi akan tetapi pengaruhnya tidak bermakna. Adapun besarnya nilai koefisien bagi hasil adalah sebesar -0,3925 artinya, jika bagi hasil meningkat sebesar 1% maka Dana Pihak Ketiga akan meningkat sebesar -0,3925% atau sebaliknya dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Tingkat Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap total Pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia. Hal ini membawa implikasi bahwa berapapun tingkat bagi hasil tidak mempengaruhi total pembiayaan yang diberikan perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh LPE Terhadap DPK Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022

Dari hasil estimasi model dan pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa LPE memiliki nilai koefisien negatif terhadap DPK dengan nilai koefisien sebesar $-0,0568 < 0,05\%$ sehingga pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0.05$) LPE berpengaruh signifikan terhadap DPK. LPE memiliki arah koefisien yang negatif artinya semakin tinggi LPE maka DPK akan semakin tinggi. Adapun besarnya nilai koefisien LPE adalah sebesar -0,0568 artinya, jika LPE meningkat sebesar 1% maka Dana Pihak Ketiga akan meningkat sebesar -0,0568% atau sebaliknya dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Pengaruh Inflasi Terhadap DPK Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022

Dari hasil estimasi model dan pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa inflasi memiliki nilai koefisien negatif signifikan terhadap DPK dengan nilai probabilitas $0,0036 < 0,05\%$ sehingga pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0.05$) inflasi berpengaruh signifikan terhadap DPK. Inflasi memiliki arah koefisien yang positif artinya semakin tinggi Inflasi maka DPK akan semakin tinggi. Adapun besarnya nilai koefisien Inflasi adalah sebesar 0,0036 artinya, jika Inflasi meningkat sebesar 1% maka Dana Pihak Ketiga akan meningkat sebesar 0,0036% atau sebaliknya dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Menurut teori tingginya harga dan pendapatan yang tetap atau pendapatan meningkat sesuai dengan besarnya inflasi membuat masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk disimpan atau diinvestasikan. Inflasi akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun (Pohan, 2008).

Besarnya Variasi Jumlah Kantor, Bagi Hasil, LPE, dan Inflasi Terhadap DPK Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diketahui bahwa besarnya variasi jumlah kantor, bagi hasil, LPE, dan inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah adalah sebesar 0.847322, artinya seluruh variasi variabel bebas (jumlah kantor, bagi hasil, LPE, dan inflasi) mampu menjelaskan variasi pada DPK Bank Umum Syariah adalah sebesar 84,73%.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Variabel jumlah kantor, bagi hasil, LPE, dan inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji-t) jumlah kantor berpengaruh positif signifikan terhadap DPK. Bagi hasil memiliki nilai koefisien positif dan berpengaruh terhadap DPK, LPE memiliki nilai koefisien negatif dan tidak berpengaruh terhadap DPK dan inflasi memiliki nilai koefisien negatif dan tidak berpengaruh terhadap DPK.
2. Variabel jumlah kantor, bagi hasil, LPE, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2022.
3. Adapun besarnya variasi variabel jumlah kantor, bagi hasil, inflasi dan LPE terhadap DPK sebesar 77,09% sedangkan sisanya karena variasi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada suami, kedua orang tua, Dosen Pembimbing, Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Unisba, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, bantuan, dukungan, dan semangatnya.

Daftar Pustaka

- [1] Iska. (2012). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- [2] Latumerissa, J. (2011). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Septi, W. (2013). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2013). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- [4] Statistik, B. P. (2022). Laju Pertumbuhan Ekonomi (Data Sepanjang Periode 2010-2022). Retrieved from Retrieved from www.bps.go.id
- [5] Statistik, B. P. (2022). Tingkat Inflasi (Data Sepanjang Periode 2010-2022). Retrieved from Retrieved from www.bps.go.id
- [6] Sukirno, S. (2001). Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008. (n.d.).
- [8] Azkia Rahma Pradinda, & Nurfahmiyati. (2023). Pengaruh Label Halal dan Tingkat Harga terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Kosmetik Pixy. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 101–110. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2857>
- [9] Ddynna Rahmawati, & Dr. Asnita Frida Sebayang. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 93–100. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2871>